

RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Renja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis Renstra Perangkat Daerah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen Renja Perangkat Daerah secara umum mempunyai nilai penting, antara lain digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian Pembangunan Nasional.

1. Merupakan instrument pelaksanaan Renstra PD;
2. Menjadi dokumen Rencana Kerja OPD, berupa program/kegiatan/sub kegiatan OPD;
3. Mewujudkan keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dan sinkronisasi pencapaian sasaran Renstra PD;
4. Digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Proses penyusunan Renja Dinas PPKB dan P3A Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2024.

Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024. Sedangkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

I.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Presiden No 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 187);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten layak Anak;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 196).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun untuk memberikan pedoman, gambaran dan arah pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Wonogiri dalam jangka pendek (satu tahun) yaitu untuk tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas PPKB dan P3A tahun 2024 adalah :

1. Menetapkan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas PPKB dan P3A tahun 2024;

2. Menyiapkan rencana Program Dinas PPKB dan P3A tahun 2024;
3. Menyiapkan rencana Kegiatan Dinas PPKB dan P3A tahun 2024;
4. Menyusun indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai, guna mencapai sasaran organisasi tahun 2024;
5. Menetapkan pendanaan indikatif untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas PPKB dan P3A tahun 2024.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PPKB DAN P3A TAHUN LALU

II.1.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PPKB DAN P3A TAHUN 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD dan RKPD, bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Renja Perangkat Daerah harus berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, guna memastikan bahwa rumusan program,kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra perangkat daerah. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas PPKB dan P3A Tahun 2021-2026. Dalam upaya mencapai target yang ditetapkan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.225.257.518,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 14.576.262.678,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.648.994.840,-. Realisasi total Belanja sebesar Rp. 15.277.647.983,- atau 88,69%. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 12.885.462.983 atau 88,40% dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 2.392.185.000,00 atau 90,31% .

Anggaran Dinas PPKB dan P3A pada tahun 2022 digunakan untuk membiayai 41 (empat puluh satu) Sub kegiatan, 16 (enam belas) Kegiatan, pada 7 Program, dengan capaian serapan tertinggi pada Program Pembinaan Keluarga Berencana sebesar 98,16% hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta pelayanan KB, juga Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB, termasuk Pengendalian dan pendistribusian Alokon serta peningkatan peran serta

masyarakat dalam pembinaan kesertaan KB. Sedangkan untuk capaian program yang terendah pada Program Penunjang Urusan Pemeritahan Kabupaten/Kota sebesar 75,32% hal ini dikarenakan adanya pegawai yang pensiun tetapi belum dapat terisi serta adanya pengawai honorer yang diterima menjadi pegawai PPPK.

Capaian kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak apabila dilihat ada Program Peningkatan Kualitas Keluarga pada tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan dikarenakan pada tahun 2022 kasus kekerasan dalam rumah tangga rendah. Ada beberapa upaya untuk mewujudkan pencapaian pada program ini terus dilakukan komunikasi, Informasi dan Edukasi sampai ke lini lapangan. Pada Program Pengelolaan system data gender pada tahun 2022 tercapai 100% hal ini diupayakan untuk pencapaian penilaian Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Wonogiri. sedangkan untuk capaian Program Pemenuhan Hak Anak pada tahun 2022 sudah tercapai 100% dikarenakan setiap OPD dan intas sektor serta dunia usaha sudah melakukan upaya untuk Pemenuhan Hak Anak, tetapi perlu ditingkatkan untuk capaian tahun berikutnya.

Capaian Kinerja Sasaran 2 Mewujudkan Pengendalian Penduduk apabila dilihat pada Program Pengendalian Penduduk pada tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan sebesar 110,50% hal ini dapat dijelaskan rata –rata PUS melahirkan anak sebanyak 1,79 sedangkan yang diharapkan adalah 2 .Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) pada tahun 2022 pada prosentase peningkatan peserta KB Aktif sudah melampaui target yaitu 101,07% pada capaian program diatas dikarenakan peningkatan Promosi dan KIE serta sosialisasi Program Bangga Kencana baik di daerah maupun sekolah-sekolah serta upaya pelayanan KB di Daerah. Capaian Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) sebesar 100% dari target 85 kelompok yang ditetapkan dapat terpenuhi dalam pembinaan ke 85 kelompok, hal ini dilakukan dengan upaya pelatihan ada Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Promosi dan Sosialisasi melalui Media. Program Hasil Evaluasi Renja perangkat daerah tahun lalu sebagai mana dalam tabel 2.1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : DINAS PPKB dan P3A											Lembar : 1	
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%) 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)		
208	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
20804	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio KDRT	0,0053	0,0063 %	0.0015%	0.0005 %	33.33 %	0,0061 %	0,0129	44,48		
208042.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga	345	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300	86,95		
208042.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Berperan aktif	16	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	10 unit	12	75		
20805	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN	Persentase Ketersediaan data Gender dan Anak	51,72	32.75 %	32.75 %	32.75 %	100 %	37,93 %	103,43	50,01		
208052.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang Mempunyai Data Gender dan Anak	75,47	26.41 %	26.41 %	26.41 %	100 %	32.07 %	84,89	36,63		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%) 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)	
20806		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	40	0.95 %	20 %	20 %	100 %	25 %	45,95	30,63
20806	2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dalam	76	50 %	50 %	50 %	100 %	56 %	156	49.36
214		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
21401		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300	60
21401	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300	60
21401	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300	60
21401	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%) 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2	14	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300	60
2	14	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300	60
2	14	02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility rate (TFR)	1,96	1.621 Angka	2 Angka	1.79 Angka	89.50 Angka	1,99 Angka	5,4	54,54
2	14	02	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Penerima Implementasi Pendidikan Kependudukan	20	4 Lembaga	4 Lembaga	1 Lembaga	25 %	4 Lembaga	9	45

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%) 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)			
2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peningkatan peserta KB aktif	79.2	77.50 %	78.32 %	79.16 %	101.07 %	78.85 %	235,51	59,88
2	14	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai KKBPK	Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi Program KKBPK	25	25 Lokasi	25 Lokasi	25 Lokasi	100 %	25 Lokasi	75	60
2	14	03	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di	Persentase Pelayanan KB di Daerah	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300	60
2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase peserta KB aktif bagi anggota kelompok BKB BKR BKL dan UPPKA	85	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300	60
2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	85	85 Kelompok	85 Kelompok	85 Kelompok	100 %	85 Kelompok	255	60

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pada tahun 2022 capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) mencapai target dari yang diperjanjikan Capaian kinerja pelayanan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri tahun 2022, realisasi Indikator Kinerja dan Perkiraan Capaian Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023, secara lebih lengkap dapat dilihat pada table 2.2

Tabel 2.2												
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PPKB												
Kabupaten Wonogiri												
NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023 (tw1)	2024	2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-
1	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	-	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	-	-	-	-	3,086	-	-	-	
			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-	-	-	-	0,007	0,006	-	-	
2	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	-	TFR (Angka Kelahiran Total)	2	1.99	1.98	1.97	1.79	1.90	1.98	1.97	
			Rasio Akseptor KB / Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)	78.32	78.85	79.00	79.20	79.16	79.63	79.00	79.20	
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	8.47	8.12	7.59	7.44	6.82	6.53	7.59	7.44	

II.3.ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2016 tersebut Tugas Dinas PPKB dan P3A adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pemberian layanan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi Pelayanan Keluarga Berencana;
2. Pemberian layanan Pengendalian Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi;
3. Pemberian layanan Komunikasi, Informasi, Edukasi Ketahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Pembentukan Kampung KB;
4. Pemberian layanan Komunikasi, Informasi, Edukasi Pemberdayaan Keluarga;
5. Pemberian layanan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi Kesenjangan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
6. Pemberian layanan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
7. Mengkoordinasikan layanan Pemenuhan Hak Anak.

Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sampai dengan akhir tahun 2022, terdapat beberapa capaian kinerja yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. GAP antara rencana dengan realisasi menunjukkan masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi di Dinas PPKB dan P3A.

Tabel 2.3

Permasalahan Yang Dihadapi Dinas PPKB dan P3A

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perlindungan Perempuan dan Anak yang belum Optimal	Belum optimalnya Pemenuhan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	Perlu peningkatan Pemahaman korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak untuk berani melapor
		Perlu peningkatan pengembangan lembaga penyedia pelayanan kualitas keluarga
		-Perlu Peningkatan pelaksanaan Komunikasi,Informasi dan Edukasi Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak bagi Keluarga
	Belum optimalnya tingkat capaian Kabupaten Layak Anak	Perlu meningkatkan Koordinasi dan komunikasi lintas sektoral dalam pencapaian Kabupaten Layak Anak yang optimal .
		Perlu Advokasi Kebijakan dan Peningkatan pendampingan pemenuhan hak anak pada lintas setor.
Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk	Masih rendahnya Rasio Akseptor KB	Perlu peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi terdadap program Bangga Kencana
		Perlu Peningkatan Penggerakan Kader Institisi Masyarakat Perdesaan (IMP)
		Perlu Peningkatan Kopentensi tenaga pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi remaja
		Perlu peningkatan kesertaan KB Pria
		Perlu Peningkatan pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB
		Perlu peningkatan sarana penunjang pelayanan KB
	Masih tingginya Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi	Perlu Peningkatan pembagunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Perlu Peningkatan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		Perlu peningkatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang sangat penting bagi perangkat daerah :

1. Isu Strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Isu Strategis pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah; Masih rendahnya perlindungan Perempuan dan Anak karena lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.
2. Isu Strategis Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Isu Strategis pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah; Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi karena belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), cukup tingginya pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terlayani.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan RKPD tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ke-4 dari RPJMD kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah dan digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD 2024 ada beberapa Sub kegiatan yang dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2024. Dan untuk sub Kegiatan dari anggaran DAK fisik dan Non fisik dikeluarkan dari pagu dikarenakan belum ada perkiraan pagu DAK hal ini dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4											
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024											
Kabupaten Wonogiri											
Nama Perangkat Daerah: Dinas PPKB dan P3A						Lembar.....dari.....					
No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD (Hasil Analisis Kebutuhan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15,067,056,058	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4,361,574,448	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				171,519,969	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				150,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Rasio KDRT	0.0058 Persen	95,274,714	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Rasio KDRT	0.0058 Persen	75,000,000	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga	345 Orang	85,484,714	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga	345 Orang	70,000,000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Berperan aktif	13 Lembaga	9,790,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Berperan aktif	13 Lembaga	5,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	43,1 Persen	9,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	43,1 Persen	25,000,000	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan data Gender dan Anak	43,1 Persen	9,000,000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan data Gender dan Anak	43,1 Persen	25,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Pemenuhan Hak Anak	30 Persen	67,245,255	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Pemenuhan Hak Anak	30 Persen	50,000,000	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dalam PHA	64 %	67,245,255	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dalam PHA	64 %	50,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD (Hasil Analisis Kebutuhan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				14,895,536,089	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				4,211,574,448	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	5,578,200,079	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	4,003,574,448	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 persen	8,999,630	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 persen	22,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	100 persen	4,144,084,878	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	100 persen	2,723,586,048	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100 persen	100,407,723	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100 persen	116,093,500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1,253,731,727	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1,050,988,400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	70,976,121	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	90,906,500	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Total Fertility rate (TFR)	1,98 Angka	41,619,398	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Total Fertility rate (TFR)	1,98 Angka	20,000,000	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah Penerima Implementasi Pendidikan Kependudukan	4 Lembaga	41,619,398	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah Penerima Implementasi Pendidikan Kependudukan	4 Lembaga	20,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD (Hasil Analisis Kebutuhan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase peningkatan peserta KB aktif	78,85 Persen	8,359,302,093	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase peningkatan peserta KB aktif	78,85 Persen	113,000,000	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi Program KKBPK	25 Lokasi	2,068,089,124	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi Program KKBPK	25 Lokasi	67,000,000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD	2664 Orang	1,411,200,000	-	-	-	-	-	-
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelayanan KB di Daerah	100 %	3,644,812,969	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelayanan KB di Daerah	100 %	46,000,000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bangga Kencana	25 Kec	1,235,200,000	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase peserta KB aktif bagi anggota kelompok BKB BKR BKL dan UPPKA	85 Persen	916,414,519	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase peserta KB aktif bagi anggota kelompok BKB BKR BKL dan UPPKA	85 Persen	75,000,000	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	85 Kelompok	916,414,519	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	85 Kelompok	75,000,000	
					15,067,056,058					4,361,574,448	

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sebagai tindak lanjut dari Musrenbang Kabupaten tidak ada usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas PPKB dan P3A .

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2024
Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : Dinas PPKB dan P3A

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tahun 2024 merupakan periode keempat dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Rencana strategis(Renstra) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024,yang merupakan penjabaran dari visi,misi dan agenda(Nawacita) PresidenJoko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.Renstra Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 mendukung dan berkontribusi langsung pada Pembangunan Nasional Prioritas *Ketiga* yaitu:***Meningkatkan Sumber daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya saing*** dan *keempat* yaitu: ***Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan***. Berbagai isu strategis yang berkembang di Indonesia saat ini dan perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan strategis,serta kebijakan program/kegiatan pada renstra BKKBB 2020-2024,antara lainsebagai berikut:

1. Bonus Demografi;
2. *Aging Population*;
3. Pendekatan Siklus Hidup Berbasis Perencanaan Hidup Berkeluarga;
4. Satu Data Kependudukan;
5. Angka kematian Ibu dan bayi Masih Tinggi;
6. Penurunan Penggunaan Kontrasepsi Modern;
7. Rendahnya Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga;
8. Kebutuhan Ber-KB Pasangan Usia Subur yang Belum Terlayani (*Unmetneed*) Masih tinggi;

9. Prevalensi Stunting Masih Tinggi;
10. Rendahnya Keluarga yang Mengetahui Fungsi Keluarga;
11. Pernikahan Usia Anak.

Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan sasaran strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/ *Total Fertility Rate (TFR)*;
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/ *Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)*;
3. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/ *Age Specific Fertility Ratio (ASFR)*;
4. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga;
5. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama;
6. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak” dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “perlindungan perempuan”. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
2. Proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah < 18 tahun;
3. Prevalensi anak 13-17 yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%);
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan; dan
7. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan terakhir.

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran dinini adalah penjabaran dari tujuan secara terukur,yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri. Tema Pembangunan rancangan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2024 adalah “Penguatan Kesejahteraan Dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah” dengan Prioritas pembangunan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
2. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang Maju dan menguasai Iptek.
3. Penguatan Kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana.
4. Pengembangan infrastruktur sarana prasarana dasar, dalam mendukung penguatan daya saing ekonomi
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah.
6. Pengurangan kesenjangan wilayah.

Diharapkan permasalahan SDM,ketenagakerjaan,perekonomian wilayah,investasi,kebencanaan,infrastruktur dan pengembangan wilayah ,serta birokrasi dan fiskal daerah dapat diselesaikan.

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri melaksanakan 2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga program kegiatan di Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri tidak secara spesifik mendukung salah satu atau beberapa program prioritas di tahun 2024, tetapi secara tidak langsung menunjang seluruh program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 tersebut diatas.

tujuan Rencana Kerja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 berdasarkan Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 adalah:

1. Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Mewujudkan Pengendalian Penduduk.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam Rencana Kerja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak

Indikator Tujuan: Rasio Jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani. Pada tahun 2024 capaian indikator yang ingin dicapai adalah 100%.

Sasaran: Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak.

Indikator Sasaran:

- a. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan (Jumlah Pengaduan/Laporan yang ditindaklanjuti oleh Unit Pelayanan Terpadu) capaian indikator ini yang diharapkan pada tahun 2024 adalah 100 % .
- b. Pada tahun 2024 Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak yang diharapkan pada tingkat Nindya.

2. Mewujudkan Pengendalian Penduduk

Indikator Tujuan: Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk capaian indikator ini pada tahun 2024 yang diharapkan adalah 0,255% .

Sasaran: Terwujudnya Pengendalian Penduduk.

Indikator Sasaran:

- a. Rasio Akseptor KB capaian pada tahun 2024 adalah 79,00%
- b. Cakupan PUS yang ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet need) target yang diharapkan 7,59% pada tahun 2024.

III.3. Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan

Dalam upaya mencapai target kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dalam periode tahun 2021-2026 ditetapkan sebanyak 7 (enam) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan, baik Program Urusan maupun Program Penunjang Urusan, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penetapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini disertai dengan pagu indikatif pendanaannya beserta rencana target yang akan dicapai pada periode 2021-2026, yang berpedoman pada proyeksi kerangka pendanaan yang ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026.

Nomenklatur Program dan kegiatan tahun 2021 yang disusun harus berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menggantikan nomenklatur Program dan Kegiatan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya. Mengingat dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 masih berpedoman pada Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, guna menjaga konsistensi RPJMD dengan RKPD tahun 2024, terlebih dahulu dilakukan pemetaan guna menjamin bahwa program dan kegiatan Permendagri Nomor 90 Tahun 2021 tetap bias direncanakan di tahun 2024, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. Rumusan rencana Program dan Sub Kegiatan Dinas PPKB dan P3A Tahun 2024 yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pembangunan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
 - a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten /Kota.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
 - a. Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Keuangan Daerah
 - e. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - f. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- g. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - i. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - j. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - k. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - l. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - m. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - n. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - o. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - p. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - q. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Program Pengendalian Penduduk;
 - a. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal
 6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
 - a. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruangan
 - b. Peningkatan Kopetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - c. Dukungan Operasional Pelayanan KB bergerak
 - d. Peningkatan Kesertaan KB Pria
 7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
 - a. Orientasi /Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - b. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja.

Tabel Program dan Kegiatan dan Prakiraan Maju Tahun 2026 sebagaimana pada tabel 3.3

Tabel 3.3																		
Unit Organisasi : 2.14.0.00.2.08.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA																		
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.2.08.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA																		
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri																		
Tahun 2024																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									150,000,000			150,000,000	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									75,000,000			75,000,000	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									70,000,000			70,000,000	
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.0058 Persen	1 Dokumen	345 Orang	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio KDRT	0.0058 Persen	70,000,000
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang									5,000,000			5,000,000	
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Berperan aktif	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	345 Orang	13 Lembaga	13 Unit	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga	345 Orang	5,000,000
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK									25,000,000			25,000,000	
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									25,000,000			25,000,000	
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase OPD yang Mempunyai Data Gender dan Anak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	43,1 Persen	20 dokumen	37,75 Persen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	43,1 Persen	25,000,000
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)									50,000,000			50,000,000	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									50,000,000			50,000,000	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Persentase lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dalam PHA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Persen	354 Organisasi	64%	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Hak Anak	30 Persen	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								4,014,574,448			5,161,769,399		
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,923,574,448			5,000,129,399		
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22,000,000			2,000,000		
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100 Persen	7 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	1,000,000
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100 Persen	12 Laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	1,000,000
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,723,586,048			3,650,396,999		
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100 Persen	19 Orang/bulan	100 %	2,722,586,048	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	3,649,396,999
2	14	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100 Persen	1 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	1,000,000
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								87,000,000			55,000,000		
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100 Persen	4 Paket	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	20,000,000
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100 Persen	15 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	5,000,000
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100 Persen	2 Paket	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	12,000,000
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100 Persen	30 Laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	18,000,000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,050,988,400			1,050,988,400			
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100Persen	4 Laporan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100Persen	1,000,000
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100Persen	12 Laporan	100 %	86,850,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100Persen	86,850,400
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100Persen	12 Laporan	100 %	963,138,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100Persen	1,164,882,000
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							90,906,500			90,906,500			
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100Persen	127 Unit	100 %	85,906,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100Persen	85,906,500
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100Persen	4 Unit	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100Persen	2,500,000
2	14	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100Persen	7 Unit	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100Persen	2,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								20,000,000					20,000,000	
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka								20,000,000					20,000,000	
2	14	02	2.01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Total Fertility rate (TFR)	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Penerima Implementasi Pendidikan Kependudukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,98 Angka	1 Dokumen	4 Lembaga	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Total Fertility rate	(TF R) 1,98 Angka		20,000,000	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								113,000,000					113,000,000	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								67,000,000					67,000,000	
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase peningkatan peserta KB aktif	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,85 Persen	1 Dokumen	25 Lokasi	67,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan peserta KB aktif	78,85 Persen	67,000,000	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								46,000,000					46,000,000	
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase peningkatan peserta KB aktif	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pelayanan KB di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,85 Persen	2 Orang	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan peserta KB aktif	78,85 Persen	6,000,000	
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase peningkatan peserta KB aktif	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase Pelayanan KB di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,85 Persen	1 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan peserta KB aktif	78,85 Persen	10,000,000	
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Persentase peningkatan peserta KB aktif	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Persentase Pelayanan KB di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,85 Persen	28 Orang	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan peserta KB aktif	78,85 Persen	30,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								75,000,000				75,000,000	
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								75,000,000				75,000,000	
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase peserta KB aktif bagi anggota kelompok BKB BKR BKL dan UPPKA	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Persen	75 Orang	85 Kelompok	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peserta KB aktif bagi anggota kelompok BKB BKR BKL dan UPPKA	85 Persen	10,000,000
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase peserta KB aktif bagi anggota kelompok BKB BKR BKL dan UPPKA	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Persen	1 laporan	85 Kelompok	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peserta KB aktif bagi anggota kelompok BKB BKR BKL dan UPPKA	85 Persen	65,000,000
TOTAL													4,361,574,448				4,361,574,448	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditentukan dalam Cascading Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri untuk pencapaian tujuan Tahun 2021-2026, dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci kedalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

IV.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikator Rasio KDRT dengan capaian yang diharapkan 0,0058%

1.1 Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub Kegiatan

1.1.1 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota,

1.2 Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak

1.2.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pembangunan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan indikator Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga target yang diharapkan 354 lembaga.

2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Dengan Indikator Persentase ketersediaan data gender dan anak, target yang diharapkan 41,3

2.1 Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyediaan data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan

2.1.1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan indicator Prosentase Pemenuhan Hak Anak target diharapkan 30%

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.

B.Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Kegiatan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pengendalian Penduduk
 - a. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal;
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB):
 - a. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Luar Ruangan;
 - b. Peningkatan Kopetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - c. Dukungan Operasional Pelayanan KB bergerak;
 - d. Peningkatan Kesertaan KB Pria;
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - a. Orientasi /Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - b. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2024. Penyusunan Renja Tahun 2024 lebih bersifat operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud, sehingga akan diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya Renja akan menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri tahun 2024.

a. Catatan Penting

Dokumen perencanaan tahun 2024 utamanya RKPD 2024 yang menjadi pedoman penyusunan Renja PD 2024. Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri telah dan akan selalu melibatkan peran Stakeholder atau pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses perumusannya melibatkan dari pemangku kepentingan dari level paling bawah melalui aplikasi SIPD Kabupaten Wonogiri.

b. Kaidah Pelaksanaan.

Perencanaan yang baik dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan. Dengan prasyarat dokumen pelaksanaan ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan. sangat ketersediaan anggaran belum mencukupi pencapaian target, diperlukan inovasi dan kolaborasi antar bidang supaya output kegiatan tetap tercapai.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam hal ini adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta mewujudkan pengendalian penduduk mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk penentuan kebijakan Pembangunan di Kabupaten Wonogiri, sehingga program dan

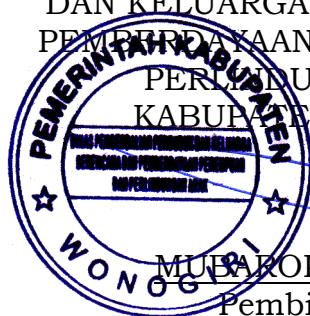
kegiatan di Dinas PPKB dan P3A yang sudah disesuaikan dengan Permendagri 90 tahun 2019 diharapkan tetap bisa berjalan dengan optimal. Untuk itu dalam penyusunan RKA, pelaksanaan hingga tahap pertanggung jawaban perlu dilakukan pengendalian secara intensif dan terus menerus melalui koordinasi, SPIP dan pengawasan.

Perubahan berbagai ketentuan perencanaan pembangunan sangat sulit diprediksi, sehingga pelaksanaan Renja pada Dinas PPKB dan P3A tahun 2024 ini bisa saja berubah, namun secara prinsip seluruh yang tertuang dalam Renja ini merupakan hasil kajian terhadap seluruh kebutuhan program dan kegiatan, perubahan yang terjadi tetap dalam upaya pencapaian.

Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri sebagai Acuan dalam pelaksanaan Pembangunan mutlak diperlukan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran pada Tahun Anggaran seluruh unsur Dinas PPKB dan P3A tetap selalu menjadikan Renja ini sebagai pedoman utama pembangunan tahun 2024.

Wonogiri,

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI



MUBAROK, SKM, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19690212 199003 1 010